



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
DENGAN  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PROVINSI SUMATERA BARAT



TENTANG  
FASILITASI PENYELENGGARAAN PELATIHAN DASAR  
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2023  
DENGAN METODE *BLENDED LEARNING*

NOMOR : 139/24/KS/BKPSDM/II/2023

NOMOR : 16/PKS/BPSDM-2023

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Satu bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (21-02-2023), kami yang bertandatangan dibawah ini:

I. ADRIAN WAHYUDI

Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota, berkedudukan di Bukit Limau, Jl. Negara Payakumbuh-Pekanbaru Km 10 Sarilamak, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 790/352/BUP-LK/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. DESNIARTI

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat, berkedudukan di Jalan Raya Indarung-Padang Besi Km. 12, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 821/1101/BKD-2023 tanggal 7 Februari 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,





PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah bidang pengembangan sumber daya manusia di Provinsi Sumatera Barat; dan
3. Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai tindaklanjut dari Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor: 120-016/MOU/GSB-2021 dan Nomor: 139/29/BLK/2021.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
8. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
	



10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pola Kontribusi dan Pola Fasilitas;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 41 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi;
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 87 Tahun 2018; dan
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah menjalin Kerja Sama dalam Fasilitas Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 dengan Metode *Blended Learning*; dan
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kolaborasi dan sinergitas dalam penyelenggaraan pelatihan di wilayah Provinsi Sumatera Barat.



Pasal 2  
OBJEK KERJA SAMA

Objek kerja sama ini adalah Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 dengan Metode *Blended Learning*.

Pasal 3  
RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJA SAMA

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Persiapan Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
- b. Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil; dan
- c. Pasca Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
	





Pasal 4  
PELAKSANAAN

Pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Persiapan Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil
  - a. Administrasi.
  - b. Penetapan jadwal.
  - c. Penetapan kurikulum dan panduan pelaksanaan.
  - d. Pelaksanaan Registrasi pada *Learning Management System (LMS)* Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
  - e. Penetapan penceramah, tenaga pengajar/pengampu materi, pembimbing/coach, penguji/evaluator, pengelola/pengawas pembelajaran, evaluator penyelenggaraan, admin/*Person In Charge (PIC)* dan host zoom meeting.
  - f. Penetapan akun zoom meeting.
  - g. Penetapan tempat pelaksanaan kegiatan, melalui:
    - Survei kelayakan tempat.
    - Rekomendasi kelayakan tempat.
- (2) Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil; dan
  - a. Administrasi.
  - b. Pelaksanaan Pelatihan Mandiri melalui MOOC (*massive open online course*) Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
  - c. Pelaksanaan *Distance Learning*, terdiri dari *e-learning* dan aktualisasi.
  - d. Pelaksanaan Pembelajaran Klasikal.
  - e. Pelaksanaan pengawas pembelajaran.
  - f. Pelaksanaan evaluasi peserta.
  - g. Pelaksanaan evaluasi tenaga pengajar.
  - h. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelatihan.
- (3) Pasca Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.
  - a. Administrasi.
  - b. Penerbitan Surat Keputusan Penetapan Hasil (SKPH) dan Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP).
  - c. Evaluasi Pasca Pelatihan.
  - d. Laporan Pelaksanaan Pelatihan.

Pasal 5  
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU meliputi:
  - a. Memperoleh rekomendasi kelayakan tempat.
  - b. Memperoleh informasi jadwal pelaksanaan.
  - c. Memperoleh informasi kurikulum dan panduan pelaksanaan pelatihan.
  - d. Memperoleh informasi tenaga pengajar, pembimbing/coach, penguji/evaluator, dan admin/PIC.



PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
	

- e. Memperoleh registrasi peserta pada *Learning Management System (LMS)* Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
  - f. Memperoleh Map Sertifikat, Sertifikat Tanda Tamat Pelatihan (STTP) dan piagam penghargaan.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU meliputi:
- a. Menyediakan sarana dan prasarana pelaksanaan pelatihan.
  - b. Menyediakan peserta.
  - c. Mengalokasikan anggaran untuk kegiatan (belanja honorarium, belanja perjalanan dinas, belanja bahan bakar minyak, belanja cetak, belanja penggandaan, belanja alat tulis kantor dan belanja lainnya).
  - d. Menyediakan pengelola/pengawas pembelajaran.
  - e. Menyediakan akun zoom meeting.
  - f. Mengelola pembelajaran.
  - g. Melaksanakan evaluasi peserta.
  - h. Melaksanakan evaluasi tenaga pengajar.
  - i. Melaksanakan rapat persiapan dan evaluasi akhir peserta.
  - j. Melaksanakan evaluasi pasca pelatihan.
  - k. Membuat dan menyerahkan laporan akhir kegiatan setiap angkatan lengkap dengan evidence/bukti.
- (3) Hak PIHAK KEDUA meliputi:
- a. Memperoleh informasi tempat pelaksanaan kegiatan.
  - b. Memperoleh informasi jumlah peserta.
  - c. Memperoleh pembiayaan sesuai dengan aturan yang berlaku (honorarium, biaya perjalanan dinas, biaya bahan bakar minyak, biaya cetak, biaya penggandaan, biaya alat tulis kantor, dan biaya lainnya)
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA meliputi:
- a. Memberikan rekomendasi kelayakan tempat.
  - b. Menetapkan jadwal pelaksanaan.
  - c. Memfasilitasi kurikulum dan panduan pelaksanaan pelatihan.
  - d. Menyediakan informasi tenaga pengajar, pembimbing/coach, penguji/evaluator, dan admin/PIC.
  - e. Melakukan registrasi peserta pada *Learning Management System (LMS)* Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
  - f. Memfasilitasi Map Sertifikat, Sertifikat Tanda Tamat Pelatihan (STTP) dan piagam penghargaan.

Pasal 6  
PEMBIAYAAN

Pembiayaan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PIHAK KESATU dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
	



## MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setiap angkatan dalam setahun; dan
- (2) Pelaksanaan monitoring, evaluasi penyelenggaraan dan pasca pelatihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

### Pasal 8 ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (*addendum*) dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama; dan
- (2) Perubahan (*Addendum*) terhadap Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan atas dasar persetujuan PARA PIHAK.

### Pasal 9 JANGKA WAKTU



- (1) Masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK; dan
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

### Pasal 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Penyelesaian perselisihan yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka PARA PIHAK sepakat menyampaikan permohonan penyelesaian perselisihan kepada Menteri Dalam Negeri.

### Pasal 11 KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi;
- (2) Apabila terjadi Keadaan Kahar, pihak yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yang tertunda karena Keadaan Kahar dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadi keadaan kahar, dengan melampirkan bukti-bukti yang sah atas terjadinya Keadaan Kahar tersebut;
- (3) Apabila dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan, pihak yang menerima pemberitahuan dianggap telah

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
	



menyetujui dan sepakat segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda secara musyawarah;

- (4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi; dan
- (5) Dalam hal PARA PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang disebabkan oleh Keadaan Kahar dan secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka tidak dianggap kesalahan PARA PIHAK.

Pasal 12  
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerjasama sama ini berakhir apabila:

- a. masa berlaku Perjanjian Kerja Sama telah berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 (sembilan) dan PARA PIHAK tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya;
- b. terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini;
- c. apabila terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada point b akan dilakukan musyawarah;
- d. masing-masing pihak dapat menyatakan kerja sama ini diakhiri apabila pihak lainnya telah gagal untuk memenuhi kewajibannya. Pemberitahuan pengakhiran dimaksud wajib mencantumkan jenis pelanggaran yang menjadi dasar pengakhiran Perjanjian Kerja Sama; dan
- e. apabila salah satu pihak bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud, maka pihak tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum rencana pengakhiran.

Pasal 13  
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Sarilamak pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,  
  
DESNIARTI  


PIHAK KESATU,  
  
ADRIAN WAHYUDI  
  


PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
